

RUU TENTANG SISTEM PERPOSAN DAN
LOGISTIK NASIONAL

AKD: RUU TENTANG SISTEM PERPOSAN
DAN LOGISTIK NASIONAL

Bulan: Juli 2020

Oleh:

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, Penyelenggara Pos telah menunjukkan peran yang penting dan strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pos yang dilakukan oleh Penyelenggara Pos perlu didukung sarana angkutan yang meliputi angkutan laut, darat, dan udara untuk umum. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos diatur tentang Asas dan Tujuan; Penyelenggaraan Pos; Prangko dan Kode Pos; Hak dan Kewajiban; Pemeriksaan Kiriman; Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos; Penyidikan; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Pidana.

Unifikasi regulasi logistik melalui pembentukan Undang-Undang (UU) Logistik merupakan amanat Peraturan Presiden No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.

Visi Logistik Indonesia 2025 dirumuskan sebagai berikut: "Terwujudnya Sistem Logistik yang terintegrasi secara lokal, terhubung secara global untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat (locally integrated, globally connected for national competitiveness and social welfare)".

Misi dari Sistem Logistik Nasional adalah:

1. Memperlancar arus barang secara efektif dan efisien untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing produk nasional di pasar domestik, regional, dan global.
2. Membangun simpul-simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan, perkotaan, antar wilayah dan antar pulau sampai dengan hub pelabuhan internasional melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan sebagaimana diuraikan diatas, pengembangan Sistem Logistik Nasional bertumpu pada 6 (enam) faktor penggerak utama yang saling terkait, yaitu:

1. Komoditas Penggerak Utama;
2. Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik;
3. Infrastruktur Transportasi;
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Manajemen Sumber Daya Manusia;
6. Regulasi dan Kebijakan.

Sumber Kutipan: http://dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_38.pdf

JENIS	KETERANGAN	URL
Jurnal	Analisis Tingkat Prioritas Atribut Kualitas Layanan Perusahaan Penyedia Jasa Layanan Logistik	https://www.neliti.com/publications/74239/analisis-tingkat-prioritas-atribut-kualitas-layanan-perusahaan-penyedia-jasa-logistik
Jurnal	Dukungan Transportasi Logistik dan Daya Saing Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN	https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmtranslog/article/view/70/112
Jurnal	Hubungan Infrastruktur Transportasi dan Biaya Logistik	http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/168
Jurnal	Kajian Kesiapan SDM Logistik Menghadapi Era MEA	https://ojs.stiami.ac.id/index.php/logistik/article/view/123
Jurnal	Kinerja Logistik Indonesia Hingga Kini	http://berkas.dpr.go.id/puskajnianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-45.pdf
Jurnal	Konvergensi Regulasi dan Kelembagaan Struktur Industri Logistik, Pos, dan Kurir	https://www.neliti.com/id/publications/41127/konvergensi-regulasi-dan-kelembagaan-struktur-industri-logistik-pos-dan-kurir
Jurnal	Model Peningkatan Kinerja Sistem Logistik yang Efektif dan Efisien	http://ojs.stiami.ac.id/index.php/logistik/article/view/127/112
Jurnal	Pemetaan Sistem Informasi Manajemen Logistik dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia	https://journal.uui.ac.id/Snatni/article/view/838
Jurnal	Pengembangan Indikator Logistik untuk Wilayah Kepulauan	http://ejournal.its.ac.id/index.php/teknik/article/view/379/2188
Jurnal	Pengembangan Sistem Logistik yang Efisien dan Efektif dengan Pendekatan Supply Chain Management	http://ejournal.kemenperin.go.id/jri/article/view/3321/pdf_617
Jurnal	Peran Perkeretaapian dalam Menunjang Sistem Logistik Nasional	http://journal.unpar.ac.id/index.php/journaltransportasi/article/view/3038/2561
Jurnal	Sistem Logistik dalam Rangka Penguatan Daya Saing Domestik	http://berkas.dpr.go.id/Puslit/Files/Buku_Tim/Buku-Tim-Publik-8.Pdf?1591686291
Jurnal	Strategi Peningkatan Pelayanan Pelabuhan dalam Mendukung Sistem Logistik Nasional	https://www.researchgate.net/publication/330739863_Strategi_Peningkatan_Pelayanan_Pelabuhan_Dalam_Mendukung_Sistem_Logistik_Nasional
Buku	Designing & Managing The Supply Chain	http://opac.dpr.go.id/catalog/index.php?p=show_detail&id=155156&keywords=supply
Buku	Himpunan Risalah Rapat Paripurna DPR RI Tahun 1988/1989 Rapat Ke-22 Tentang RUU Telekomunikasi	http://opac.dpr.go.id/Catalog/index.php?p=show_detail&id=272169&keywords=himpunan+risalah+rnapat+telekomunikasi
Buku	Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi	http://opac.dpr.go.id/Catalog/index.php?p=show_detail&id=243182&keywords=hukum+telekomunikasi+penyiaran
Buku	Keamanan dan Jaminan Hak Pemda di Bidang Telekomunikasi	http://opac.dpr.go.id/Catalog/index.php?keywords=keamanan+jaminan+pemda+telekomunikasi&search=search
Buku	Manajemen Logistik	http://opac.dpr.go.id/Catalog/index.php?p=show_detail&id=326177&keywords=manajemen+logistik
Buku	Manajemen Logistik Terintegrasi	http://opac.dpr.go.id/Catalog/index.php?p=show_detail&id=326180&keywords=manajemen+logistik+terintegrasi

Buku	Pengantar Hukum Telekomunikasi	http://opac.dpr.go.id/Catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=134\n02&keywords=pengantar+hukum+te\nlekomunikasi
Buku	Produktivitas & Efisiensi Supply Chain Management	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=142\n32&keywords=supply
Buku	Sistem Telekomunikasi di Indonesia	http://opac.dpr.go.id/Catalog/\nindex.php?keywords=sistem+tele\nkomunikasi+indonesia&search=se\narch
Buku	Sistem Transportasi Nasional (Sistranas)	https://photo.reqnews.com/prod\nuk/236a4b66dd3c326a0839e39dc2e\n6df2.pdf
Buku	Strategi Manajemen Pembelian dan Supply Chain	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=134\n98&keywords=supply
Buku	Supply Chain Management	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=203\n06&keywords=supply
Buku	Supply Chain Redesign: Transforming Supply Chains Into Integrated Value Systems	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=201\n93&keywords=supply
Buku	Transform Your Supply Chain	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=203\n19&keywords=supply
Buku	World Class Supply Management	http://opac.dpr.go.id/catalog/\nindex.php?p=show_detail&id=195\n90&keywords=supply
Undang-undang & Peraturan	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KM. 168 TAHUN 2019 TENTANG PERSETUJUAN PENDAFTARAN BADAN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA NASIONAL KEPADA PT KRAKATAU ARGO LOGISTICS UNTUK MENYELENGGARAKAN ANGKUTAN MULTIMODA DI NEGARA ANGGGOTA ASEAN	http://jdih.dephub.go.id/asset\ns/uudocs/kepmen/2019/KM_168_TA\nHUN_2019.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA	https://www.gitews.org/tsunami\n-kit/id/E6/sumber_lainnya/prod\nuk_hukum_nasional/peraturan_ke\nnpala_BNPB/Perka%20BNPB%2013-20\n08_Pedoman%20Manajemen%20Logis\ntik%20dan%20Peralatan%20PB.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN BANTUAN LOGISTIK	https://bencana-kesehatan.net/\nimages/stories/2012/1/file/PP/\nPP%20Kepala%20BNPB%20RI_No.04%\n20Tahun%202009_Pedoman%20Bantu\nan%20Logistik.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 06 TAHUN 2009	https://bnpb.go.id/uploads/mig\nration/pubs/56.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.04//2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman	https://jdih.kemenkeu.go.id/fu\nllText/2016/182~PMK.04~2016Per\n.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2_8 /PMK.04/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 272/PMK.04/2015 TENTANG PUSAT LOGISTIK BERIKAT	https://jdih.kemenkeu.go.id/fu\nlltext/2018/28~pmk.04~2018per.\n.pdf
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tanggal 22 September 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos	https://jdih.kominfo.go.id/pro\nduk_hukum/view/id/231/t/peratu\nran+menteri+komunikasi+dan+inf\normatika+nomor+32+tahun+2014+t\nanggal+22+september+2014

Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Mekanisme Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal	https://jdih.kominfo.go.id/pro\nduk_hukum/view/id/562/t/peratu\nran+menteri+komunikasi+dan+inf\nnormatika+nomor+4+tahun+2017+ta\nnnggal+24+januari+2017
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 7 Februari 2017	https://jdih.kominfo.go.id/pro\nduk_hukum/view/id/568/t/peratu\nran+menteri+komunikasi+dan+inf\nnormatika+nomor+7+tahun+2017+ta\nnnggal+7+februari+2017
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos	https://jdih.kominfo.go.id/pro\nduk_hukum/view/id/304/t/peratu\nran+menteri+komunikasi+dan+inf\nnormatika+nomor+9+tahun+2015+ta\nnnggal+12+februari+2015
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos	https://jdih.kominfo.go.id/pro\nduk_hukum/view/id/538/t/peratu\nran+menteri+komunikasi+dan+inf\nnormatika+nomor+9+tahun+2016+ta\nnnggal+1+juli+2016
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08 /PER/M.KOMINFO/03/2012 tanggal 20 Maret 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pos Market Surveillance	https://jdih.kominfo.go.id/pro\nduk_hukum/view/id/31/t/peratur\nan+menteri+komunikasi+dan+info\nrmatika+nomor++08+permkominfo0\n32012+tanggal+20+maret+2012
Undang-undang & Peraturan	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/Per/M.Kominfo/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang FORMULA TARIF LAYANAN POS KOMERSIAL	https://jdih.kominfo.go.id/pro\nduk_hukum/view/id/24/t/peratur\nan+menteri+komunikasi+dan+info\nrmatika++nomor+01permkominfo01\n2012+tanggal+10+januari+2012
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS	https://ppidkemkominfo.files.w\nordpress.com/2016/07/pp_nomor_\n15_tahun_2013-pelaksana-uu-pos\n.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL	https://peraturan.bkpm.go.id/j\n dih/userfiles/batang/Pepres_26\n_2012.pdf
Undang-undang & Peraturan	Regulasi Smart Logistics	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/11955
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005-2025	http://dpr.go.id/dokjdih/docum\nent/uu/UU_2007_17.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS	http://dpr.go.id/dokjdih/docum\nent/uu/UU_2009_38.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1984 TENTANG POS	http://dpr.go.id/dokjdih/docum\nent/uu/685.pdf
Surat kabar	Asal muasal sistem pos	http://epaper.dpr.go.id/index/\n/detail/id/12043
Surat kabar	DAYA SAING - Biaya Logistik Indonesia Masih Tinggi	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/9634
Surat kabar	DISTRIBUSI - BUMN Dorong Perbaikan Sistem Logistik	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/7921
Surat kabar	INDUSTRI - Pemerintah Dorong Pusat Logistik Berikat	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/2228
Surat kabar	JOKOWI MINTA PLATFORM TUNGGAL: ONGKOS LOGISTIK MAHAL	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10863
Surat kabar	LOGISTIK - Program Tol Laut Didorong Lewat Sine	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/9614
Surat kabar	LOGISTIK - Tumbuh Lewat Merger	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/6196
Surat kabar	Logistik Nasional - UU Sislognas Dinilai Mutlak	http://kliping.dpr.go.id/index\n/detail/id/11491
Surat kabar	OMNIBUS LAW - RUU CIPTA KERJA MINIM MENGATUR SEKTOR LOGISTIK	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/10815

Surat kabar	Paket Kebijakan Ekonomi Ke-15 Perbaiki Daya Saing Logistik	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/6557
Surat kabar	PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XV: Giliran Logistik	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/6567
Surat kabar	PERINDUSTRIAN - Bisnis Transportasi dan Logistik Prospektif	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/9452
Surat kabar	Sistem Logistik Nasional - Pembentukan UU Tak Mendesak	http://kliping.dpr.go.id/index/detail/id/11572
Surat kabar	Sistem pos dalam sejarah islam	http://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/12044
Surat kabar	Tarif Tol, Pungli & Ongkos Logistik	https://epaper.dpr.go.id/index/detail/id/9323